

# Peningkatan Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional Melalui Implementasi Tax Amnesty

**Author:**  
Amri Amrulloh

**Afiliation:**  
Politeknik Negeri  
Madiun

**Corresponding email**  
amri@pnm.ac.id



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak:**

Tidak semua wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak yang terutang padahal pajak merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan peran pajak dalam pembangunan nasional melalui penerapan tax amnesty. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan studi literatur dan kuesioner sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah dosen Jurusan Akuntansi Komputer Politeknik Negeri Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosen jurusan akuntansi komputer patuh membayar pajak, sudah melaporkan seluruh harta kekayaan, sudah mengetahui kebijakan dan manfaat tax amnesty. Sebagian *besar* responden tidak mengikuti program tax amnesty dan responden setuju jika tax amnesty diberlakukan kembali di masa mendatang.

**Kata kunci:** Tax, Tax Amnesty, Pajak, Pengampunan Pajak

## Pendahuluan

Penerimaan utama pendapatan negara dihasilkan dari pajak. Pembangunan di Indonesia tidak akan terlaksana tanpa adanya pajak. Hal itu akan membuat hutang Indonesia ke luar negeri semakin bertambah. Besarnya peran pajak, tidak membuat semua wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak. Pada faktanya banyak dari mereka yang menghindar. Misalnya, dengan cara melakukan pencucian uang dan menyimpan kekayaan secara tersembunyi di negara asing yang memiliki julukan tax haven country. Tercatat 2.961 nama dari Indonesia yang terdiri dari elit politik dan pengusaha dengan total kekayaan mencapai ribuan triliun rupiah terjadi pada kasus panama papers, (Kompas, 2016).

Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka akan muncul ketidakadilan dan dapat memperburuk keadaan perekonomian di Indonesia. Kebijakan tegas yang diambil oleh Pemerintah Negara Indonesia, yakni dengan mencanangkan program tax amnesty. Program ini membantu untuk mengungkapkan seluruh harta wajib pajak di dalam negeri ataupun di luar negeri.

## Studi Literatur

### Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran wajib yang berasal dari warga negara bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang, untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Objeknya merupakan sumber pendapatan dan seluruh harta kekayaan sesuai dalam undang-undang perpajakan.

### Asas Pajak

1. Asas Domisili, pajak dikenakan berdasarkan tempat tinggal.

2. Asas Kebangsaan, pajak dikenakan kepada wajib pajak yang lahir dan tinggal di Indonesia dalam waktu lebih dari satu tahun.
3. Asas Sumber, pajak dikenakan atas asal atau sumber objek pajak.

### **Tujuan dan Manfaat Pajak**

1. Pajak digunakan untuk membiayai APBN, termasuk pengeluaran reproduktif yang berdampak langsung kepada masyarakat, bersifat self liquidating, dan pengeluaran tidak produktif seperti infrastruktur, pemilu dll.
2. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan program-program yang dirancang pemerintah.

### **Pengertian dan Tujuan Tax Amnesty**

Tax Amnesty merupakan pengampunan pajak untuk menghapuskan denda keterlambatan pembayaran pajak dengan membayarkan sejumlah uang. Berikut tujuan dari tax amnesty:

1. Meningkatkan pemasukan APBN dari pajak.
2. Meningkatkan repatriasi.
3. Reformasi sistem pajak.

### **Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II**

Tax Amnesty jilid I dimulai tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Karena tarifnya yang kurang maksimal dan untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan pemerintah kembali menerapkan Tax Amnesty Jilid II yang secara resmi dinamakan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) pada bulan Januari sampai Juni 2022.

### **Metode Penelitian**

#### **Rencana Kerja**

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan pembuatan rencana kerja dimana dianggap penting karena menjadi pedoman yang mengatur jalannya penelitian melalui perencanaan. Sehingga sangat diperlukan rencana kerja yang terstruktur. Langkah kerja yang pertama adalah menentukan sampel penelitian yaitu dosen Jurusan Komputer Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Langkah kedua, membuat kuesioner implementasi tax amnesty untuk mengidentifikasi permasalahan dari topik yang diambil dengan menjelaskan permasalahan dan mengukur sejauh mana batas permasalahan tersebut. Langkah ketiga, menentukan media penyebaran kuesioner. Data yang terkumpul berupa analisis dari implementasi tax amnesty dari masing masing responden. Tahap terakhir melakukan rekapan data kuesioner dan menulis laporan penelitian.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kesadaran pembayaran pajak dan tax amnesty. Kuesioner dibuat menggunakan media google form agar udah diakses seluruh responden. Tujuan penggunaan metode pengumpulan data melalui kuesioner untuk mengukur penilaian dari hasil kuesioner. Selain menggunakan metode kuesioner juga menggunakan metode studi pustaka dimana mempermudah peneliti dalam mencari materi pembahasan dalam penelitian.

---

## **Teknik Sampling**

Dalam menentukan sampel menggunakan teknik sampling. Teknik ini membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan sasaran pada lapangan. Tujuan dari penentuan sampel adalah memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan penelitian. Penelitian ini memutuskan hanya dosen jurusan komputer akuntansi yang mengisi kuesioner karena lebih memahami tax amnesty dan juga sudah memiliki penghasilan.

## **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang relevan adalah deskriptif yang membahas penyelesaian atau pemecahan masalah dari data yang sudah dikumpulkan dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan.

## **Jenis Data**

### **Data Primer**

Data yang didapatkan secara langsung dari sasaran sampel. Data tersebut dikumpulkan peneliti melalui objek penelitian. Data primer yang digunakan adalah kuesioner, melalui kuesioner dilakukan langsung melalui pengisian google form oleh responden.

### **Data Sekunder**

Data yang didapatkan secara tidak langsung dimana menggunakan studi pustaka. Studi pustaka berupa materi pembahasan dan laporan yang berasal dari sumber lain.

## **Hasil**

### **Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional**

Banyak manfaat yang akan dirasakan apabila penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik. Pertama, adanya subsidi untuk beberapa bidang. Seperti bidang pendidikan, sesuai dengan Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Masyarakat dapat menyekolahkan anaknya tanpa perlu membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan juga mendapatkan buku gratis. Hal ini pastinya sudah dirasakan di sekolah negeri dibawah naungan Kementerian Pendidikan. Sebagaimana halnya dengan para mahasiswa yang juga sudah merasakan dampak dari kontribusi pajak, yaitu adanya program Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Program ini diperuntukkan bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah tetapi tidak mampu secara finansial. Dengan program ini, semua siswa di Indonesia bisa memiliki harapan serta cita-cita yang tinggi untuk masa depan lebih cerah. Dan terakhir, dilihat dari adanya pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan, seperti perpustakaan, sekolah, tempat baca maupun kampus.

Di bidang kesehatan, listrik, bahan bakar, dan bahan pangan juga mendapatkan subsidi. Salah satu bentuk pemberian subsidi dibidang kesehatan yaitu adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) / Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masyarakat yang kurang mampu tidak perlu risau dengan biaya kesehatan yang mahal. Lalu, ada subsidi listrik dan bahan bakar, yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang berada di pelosok. Dan terakhir, ada subsidi bahan pangan yang membuat masyarakat juga tidak perlu khawatir kelaparan. Subsidi ini biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu berupa bahan pokok seperti beras, minyak dan lain-lain.

Selanjutnya, yaitu poin ke tiga dalam Nawacita Jokowi-JK adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pajak yang dibayarkan masyarakat dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang belum ada. Seperti, pembangunan

jalan yang berlubang di desa-desa pelosok, kemudian pembangunan jembatan sebagai penghubung desa untuk memudahkan mobilitas masyarakat dengan desa lainnya dan masih banyak lagi. Lalu, untuk menciptakan negara demokratis sesuai Nawacita, tentunya membutuhkan dana didalamnya. Seperti, untuk menggaji para pejabat negara, para wakil rakyat parlemen, dan tentunya para pemimpin. Bahkan, dana untuk pembiayaan kampanye calon pemimpin daerah juga dibiayai negara.

Pajak menjadi komponen terbesar dalam penerimaan APBN. Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) telah mengumumkan penerimaan negara senilai Rp2.540,4 triliun, Rp1.865,7 triliun berasal dari pajak. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan daerah (Kemenkeu RI, 2020).

## Pembahasan

### Pencapaian Tax Amnesty Jilid I dan II

Tax Amnesty jilid I diberlakukan 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Dasar hukumnya adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Total wajib pajak yang ikut adalah sebanyak 956.793, total aset yang terungkap adalah Rp4.854,63 triliun dan uang yang diterima oleh negara adalah Rp114,02 triliun, pencapaiannya 69% dari target penerimaan Rp165 triliun (CNN Indonesia, 2021).

Tax Amnesty Jilid II secara resmi dinamakan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) pada bulan Januari sampai Juni 2022. Dasar hukumnya adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021. Program ini diikuti oleh 212.240 wajib pajak. Total harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp532,426 triliun. Penerimaan pajak oleh negara dalam bentuk Pajak Penghasilan mencapai Rp54,23 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

### Data Responden

Responden merupakan wajib pajak kalangan dosen Jurusan Komputer Akuntansi di Politeknik Negeri Madiun.

Tabel 1 Hasil Kuesioner

| Data Pertanyaan  | Presentase |       |
|--|------------|-------|
|  | Ya         | Tidak |
| Apakah Bapak/Ibu mempunyai pekerjaan selain dosen?                             | 43%        | 57%   |
| Apakah Bapak/Ibu taat membayaran pajak?  | 91%        | 9%    |
| Apakah Bapak/Ibu sudah melaporkan seluruh kekayaan yang merupakan objek pajak? | 83%        | 17%   |
| Apakah bapak/ibu mengetahui penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia?      | 83%        | 17%   |
| Apakah Bapak/Ibu mengikuti program tax amnesty?                                | 26%        | 74%   |
| Apakah implementasi dari Tax amnesty bermanfaat bagi negara?                   | 94%        | 6%    |
| Apakah tax amnesty perlu diberlakukan kembali di masa mendatang?               | 83%        | 17%   |

|                                     | Tidak Penting | Penting | Sangat Penting |
|-------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| seberapa penting pajak bagi negara? | 0%            | 29%     | 71%            |

Berdasarkan tabel presentase hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa dosen jurusan komputer akuntansi taat akan pembayaran pajak, sudah melaporkan seluruh kekayaan, sudah mengetahui kebijakan serta manfaat *tax amnesty*. Banyak dari dosen yang tidak mengikuti program *tax amnesty*. Sebagian besar dari mereka setuju diberlakukannya kembali program tersebut.

### Kesimpulan

Pajak memiliki kontribusi besar dalam APBN Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak sebagai wujud gotong royong dalam pembangunan nasional. Pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan adanya kepatuhan dalam membayar pajak, maka akan tercipta keadilan, pemerataan pendapatan dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Semakin tinggi penerimaan pajak oleh negara, maka akan semakin banyak pula pembangunan yang dapat direalisasi. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak adalah dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty*.

### Referensi

Amrulloh, A., & Amalia, A. D. (2020). Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 167–184.

APBN 2020?. <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/alokasi-pajakmu/>. Diakses pada 17 Juli 2022.

CNN Indonesia.2021.Melihat Hasil Tax Amnesty Jilid I di Tengah Rencana Jilid II

CNN Indonesia.2021.Pengertian, Tujuan, dan Cara Kerja Tax Amnesty. Diakses pada 17 Juli 2022.

Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Program Pengungkapan Sukarela.

Hartanya di Luar Negeri. <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/060600626/Heboh.Panama.Papers.Begini.Cara.Nasabah.Superkaya.Simpan.Hartanya.di.Luar.Negeri>. Diakses pada 17 Juli 2022.

<https://pajak.go.id/pps>. Diakses pada 17 Juli 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520092541-532-644557/melihat-hasil-tax-amnesty-jilid-i-di-tengah-rencana-jilid-ii>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520114324-537-644655/pengertian-tujuan-dan-cara-kerja-tax-amnesty>. Diakses pada 18 Juli 2022.

<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>. Diakses pada 18 Juli 2022.

Kemenkeu RI. 2020. Bagaimana Negara Menggunakan Uang Pajak Anda dalam

---

Kompas. 2016. Heboh Panama Papers Begini Cara Nasabah Superkaya Simpan

Pajakku. 2019. Pengetahuan Umum Perpajakan.

Serupa.id. 2021. Metode Penelitian Deskriptif. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>. Diakses pada 18 Juli 2022.